BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karena, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak.¹

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.”

Anak merupakan anggota keluarga yang wajib dilindungi oleh setiap anggota lain yang ada didalam keluarga. Kebutuhan setiap anak harus dipenuhi dan diperhatikan sehingga potensi anak dapat dikembangkan dengan baik, selain itu rasa nyaman dan suasana yang tenteram perlu diciptakan oleh keluarga terhadap anak.

¹Zuhdi Achmad, 2010, *HAM Dalam Undang – Undang Dasar 1945*, <http://zuhdiachmad.blog.spot>, diakses pada hari Rabu tanggal 4 November 2019, Pukul 14:10 WIB.

Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Selain itu peranan keluarga dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil didalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Oleh karena itu, tidak jarang pula pasangan yang belum mempunyai anak akan melakukan berbagai usaha demi mendapatkan anak. Salah satu upaya untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung yaitu dengan mengangkat anak atau adopsi.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya”.

Pengertian tentang anak angkat dapat dilihat secara *etimologi* dan *terminologi*. Secara *etimologi*, anak angkat berasal dari kata *adoptie* (bahasa Belanda) atau *adopt* (*adoption*) bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* diartikan sebagai mengambil anak angkat. Pengertian secara *terminologi*, memberikan definisi pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan

ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.²

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh Indonesia. Akan tetapi mempunyai cara dan motivasi yang berbeda-beda menurut hukum adat yang dianut daerah yang bersangkutan. Hukum adat tumbuh dengan kesadaran hukum masyarakat yang sifatnya tidak tertulis atau maksudnya ialah tidak dikodifikasikan.

Dalam hukum adat anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri.³ Hilman Hadi Kusuma menegaskan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴ Dalam hal ini pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat yaitu dalam hal harta kekayaan orangtua angkatnya.

Perpindahan hak milik harta di dunia ini berada dalam suatu proses silih berganti orang yang memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Hal ini akan berhubungan dengan

² Muderis Zaini, 2006, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.

³ Anonim, 2013, *Pengertian Anak Angkat Dalam Hukum Adat Dan Hukum Perdata*, <https://feelinbali.blogspot.com/2013/05/pengertian-anak-angkat-menurut-hukum.html>, diakses pada hari Selasa 4 Februari 2020, Pukul 17:10 WIB.

⁴ Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 114.

pemindahan harta dari orang tua kepada anak-anaknya dengan menggunakan hukum waris. Akan tetapi lain halnya ketika sebuah keluarga ditakdirkan untuk tidak mempunyai keturunan, maka pemindahan harta ini bisa dilakukan dengan jalan hibah atau wasiat kepada orang lain.⁵

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.⁶

Pemberian hibah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena ISLAM secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. Lain halnya dengan adat istiadat yang ada di Indonesia, masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. tidak semua anak angkat mewarisi harta orang tua angkatnya, sebaliknya terdapat beberapa daerah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung dengan demikian

⁵Anonim, 2018, *Hak Anak Angkat Atas Harta Peninggalan OrangTua Angkat*, <http://konsultasi-hukum-online.com/2014/11/hak-anak-angkat-atas-harta-peninggalan-orang-tua-angkat/>, diakses pada hari Selasa 4 Februari 2020, Pukul 17:10 WIB.

⁶Zakaria Hasibuan, 2005, *Pengertian Hibah dan Macam-Macam Hibah*, <https://eprints.uns.ac.id/3731/1/173532312201007451.pdf>, diakses pada hari Selasa 4 Februari 2020, Pukul 16:00 WIB

berhak atas harta orang tua angkatnya. Sedangkan banyaknya harta yang dihibahkan maksimal adalah 1/3 (sepertiga) harta bendanya.⁷

Dalam masyarakat di Kecamatan Sarolangun Jambi anak angkat tidak mendapatkan harta dari orangtua angkat. Namun dalam praktiknya anak angkat bisa mendapatkan harta orangtua angkatnya melalui pemberian semasa orangtua angkatnya masih hidup dengan syarat harta tersebut merupakan harta pencaharian atau harta bersama dari orangtua angkat. Harta bersama atau harta pencaharian bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh suami-istri selama perkawinan harta pencaharian atau harta bersama ini dapat diperoleh atas usaha suami sendiri saja, atau usaha istri sendiri saja atau atas usaha kedua-duanya dapat disebut dengan harta bersama.⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga adat melayu di Kabupaten Sarolangun Jambi terdapat kasus anak angkat yang mendapatkan pemberian harta dari orangtua angkatnya, namun pada setiap kasus harta yang diberikan berbeda-beda dan tidak sama banyaknya.

Berdasarkan uraian di atas, pemberian harta orangtua angkat kepada anak angkat diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya terutama berkaitan dengan cara pelaksanaan pemberian harta terhadap anak angkat, karena itu penulis mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang diberi judul: **PEMBERIAN HARTA ORANGTUA ANGGAT KEPADA ANAK ANGGAT DALAM PRAKTINYA DI KECAMATAN SAROLANGUN JAMBI.**

B. Rumusan Masalah

⁷ Mardhani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 130.

⁸ Sigit Supto Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, hlm 64

1. Bagaimanakah praktik pemberian harta orangtua angkat kepada anak angkat di Kecamatan Sarolangun Jambi?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang ditemui dalam praktik pemberian harta orangtua angkat kepada anak angkat di Kecamatan Sarolangun Jambi dan upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemberian harta orangtua angkat kepada anak angkat di Kecamatan Sarolangun Jambi.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa sajayang ditemui dalam praktik pemberian harta orangtua angkat kepada anak angkat di Kecamatan Sarolangun Jambi dan upaya penyelesaiannya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.⁹ Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer, di samping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 153.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Maksudnya deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau maksud untuk eksploritas dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah *variabel* yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.¹⁰ Sehingga penulis dapat menjelaskan bagaimana gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan dan kendala dalam praktik pemberian harta orangtua angkat kepada anak angkat di Kecamatan Sarolangun Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari Aman, Bapak Iskandar sebagai kakak dari orangtua angkat, serta informan yang terdiri Ketua Lembaga Adat Melayu yang berada di Kabupaten Sarolangun Jambi yaitu Bapak Herman.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri atas :
 - 1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:
 - a) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

¹⁰Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 33.

d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, dokumen atau laporan yang dikumpulkan oleh lembaga adat serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal dan artikel di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan informan dan responden. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan pokok sebagai alat pengumpul data kemudian dikembangkan pada saat penelitian berlangsung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.